



Jurnal BADATI

Vol. 3 No. 2 November 2021

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 - 3248

Hal. : 126-136

PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS KOLEKTIF

¹M. Asrul Pattimahu ²Demsy Wattimena

Pengembangan Masyarakat Islam, Ushulludin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ambon

rully.chair@iainambon.ac.id

Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Kristen Indonesia Maluku

edems_watti@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kedalaman makna kehidupan berbangsa sekaligus bernegara di Indonesia ditengah tumbuhnya politik identitas. Dalam artikel ini Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai suatu doktrin, tetapi sebagai proyek yang harus terus dihidupkan dalam membangun dan menumbuhkan spiritualitas sosial, menjadi factor kohesi dan melahirkan kesadaran kolektif sebagai identitas pemersatu bangsa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan mengklasifikasi data dan memberi makna terhadap data yang dikumpulkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila harus dipahami dalam pengertian sebagai proyek dalam konstruksi identitas nasional, yang muncul setelah identitas agama dan budaya. Dalam situasi ini, Pancasila merupakan nilai baru yang menyatukan dan melengkapi kekayaan makna hidup dalam konteks kehidupan sosial suatu bangsa. Pancasila tidak berhenti pada satu era dalam memberi makna pada kehidupan sosial; justru, kedalaman makna hidup berbangsa terus tumbuh karena membutuhkan kreativitas untuk beradaptasi dengan konteks masyarakat yang juga selalu berkembang.

Kata Kunci : Pancasila, Identitas, Kolektif

PENDAHULUAN

Eksistensi sebuah Negara bangsa sejatinya merupakan manifestasi dari perasaan kolektif warga bangsa, berikut keinginan dan harapan-harapan dimana rasa itu dititipkan untuk membangun kehidupan dan masa depan anggotanya, yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai tujuan bernegara. Dalam teori politik manifestasi kolektif itu dikenal dengan istilah *social contract* (kontrak sosial), dimana warga negara menyerahkan kedaulatannya kepada orang yang diberikan kekuasaan tertentu untuk mengurus kepentingan publik,¹ yakni pemerintah. Pemerintah merupakan suatu institusi penting dalam kehidupan bernegara, karena itu dia menjadi determinan dalam kerangka mencapai tujuan bernegara sesuai dengan kontrak sosial yang dibangun bersama.²

Konsep *social contract* itu menjadi ciri utama dari esensi sebuah negara bangsa yang terbentuk dari kumpulan pribadi-pribadi dengan berbagai latar belakang suku, ras, agama, golongan dan lainnya dalam kesadaran bersama yang menyatu di dalam wadah

¹ Komaruddin Hidayat, *Agama Untuk Peradaban: Membumikan Etos Agama Dalam Kehidupan* (Pustaka Alvabet, 2019), h. 242

² Said Sagaff, Muhammad Mario Said, and Widiawati Said Sagga, *Reformasi Pelayanan Publik Di Negara Berkembang*, 1st edn (SAH MEDIA, 2018), h. 117-118

yang menjadi *melting-pot* - tempat semuanya mencair membangun kehidupan bersama-sama secara egaliter. Peristiwa 17 Agustus 45 sebagai momentum lahirnya negara-bangsa Indonesia yang merdeka sebagaimana tercermin dalam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia “*kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia*”. Kata “kami” merupakan representasi dari warga, pribadi-pribadi, gabungan berbagai entitas agama, suku, ras, dan budaya yang mempunyai keinginan dan tujuan bersama.³ Meski demikian, bangsa Indonesia bukanlah kesatuan yang dibangun atas solidaritas etnis atau ras, keagamaan atau bahkan kedekatan geografis tetapi karena rasa kesamaan pengalaman dan solidaritas khusus yang mengalir darinya.⁴

Memang seharusnya demikian, bahwa pembentukan masyarakat yang terikat secara horisontal (atau menggunakan istilah Benedict Anderson “*conceptually egalitarian*”, setara pada tataran konsep) membutuhkan reformasi sosial dan politik. Douwes Dakker berpendapat bahwa yang membentuk negara bukanlah kesatuan ras, kepentingan atau bahasa, tetapi kesatuan hukum yang mengatur bentuk negara.⁵ Kesatuan horisontal memang akan melahirkan dunia baru bagi masyarakat yang membangun solidaritas sosial baru, karena itu diperlukan reformasi terhadap sistem solidaritas yang biasanya dibangun berdasarkan patron klan, suku, rasa atau yang lainnya sehingga dapat menciptakan egalitarianisme dalam dunia baru yang dibayangkan bersama-sama.

Artikel ini bertujuan untuk mendalami kembali makna kehidupan berbangsa sekaligus bernegara di Indonesia ditengah kuatnya kesadaran politik identitas yang dianggap menjadi ancaman bagi rasa dan makna kebangsaan Indonesia.

politik identitas dengan memposisikan Pancasila sebagai suatu doktrin untuk membangun spiritualitas sosial sehingga menjadi kohesi dan integrasi sosial.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif dengan menjadikan data tertulis sebagai sumber primer. Teknik pengumpulan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan mencari dan mengumpulkan referensi dari berbagai buku dan artikel jurnal ilmiah yang sesuai dengan masalah dalam artikel ini. Data kepustakaan yang dikumpulkan, dipilah sesuai tema dan disajikan dalam bentuk kata-kata untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Analisis data dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pengkodean data. Pengkodean data merupakan proses mengubah materi atau informasi menjadi potongan-potongan tertulis sebelum melakukan analisis. Langkah ini dilakukan untuk mengklasifikasi data tertulis kedalam kategori tertentu sehingga data yang dikumpulkan dapat memberi makna dan menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Agama Sipil; Memperkuat Kesadaran Kolektif Negara-Bangsa

Negara bangsa esensinya adalah menjadikan kehidupan sosial politik sebagai masalah bersama melalui kelembagaan, yakni terbentuknya sebuah institusi yang memiliki kekuasaan dalam batas-batas tertentu. Seperti apa yang ditulis Peter L. Berger, bahwa suatu kehidupan sosial dilembagakan jika suatu masalah sosial itu menjadi masalah bersama, karena fungsi struktur-struktur dalam kelembagaan itu akan memiliki

³Rudianto Soesilo, *Lahirnya Negara Bangsa*, diakses dari <http://news.unika.ac.id/2018/08/lahirnya-negara-bangsa/>

⁴ Robert Edward Elson, *The Idea of Indonesia* (Penerbit Serambi, 2009), h. 22-23

⁵ Elson, h. 25

relevansi dengan kepentingan secara bersama-sama.⁶ Dalam konteks itu, suatu negara dibentuk tidak lain adalah untuk mengurus kepentingan publik secara kolektif, tidak secara parsial untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja.

Tujuan negara bangsa ialah mewujudkan kemanfaatan umum, yakni suatu konsep tentang kebaikan yang meliputi seluruh warga negara tanpa kecuali. Dalam perspektif ini, negara bangsa berbeda dengan negara kerajaan yang terbentuk tidak berdasarkan kontrak sosial, tetapi karena kepeloporan seorang tokoh kuat yang dominan seperti yang ada pada cerita pendirian negara-negara monarki. Karena itu negara kerajaan berdiri demi kejayaan seorang raja dan dinastinya, sedangkan negara bangsa berdasarkan kontrak sosial dalam pembentukannya.⁷

Pada prinsipnya gagasan *civil religion* merupakan bagian dari mekanisme pembangunan *civil society*, terutama dalam relasinya dengan konteks kehidupan sosial-politik. Pemikiran *civil religion* diyakini merupakan upaya untuk menemukan kembali ruh kehidupan agama dalam wajah modern. Adanya kebutuhan untuk mereposisi agama dalam interpretasi-interpretasi modern sehingga memungkinkan jalannya modernisasi itu sendiri di satu sisi, dan hidupnya agama disisi lain. Banyak redefinisi yang perlu dilakukan terhadap simbol-simbol dan kelembagaan dalam masyarakat beragama. Masyarakat kontemporer tidak puas lagi menerima hegemoni-hegemoni simbol keagamaan yang membatasi nalar-rasio mereka.⁸

Tidak berlebihan jika dikemukakan bahwa munculnya konsep *civil religion* merupakan derivasi fakta historisitas yang nampak adanya kehidupan yang serba plural di muka bumi.⁹ Kehidupan yang serba plural tersebut merupakan sesuatu yang alami, atau jika menggunakan bahasa agama bahwa kehidupan tersebut merupakan sunnatullah. Hal tersebut bermakna bahwa manusia memang sengaja diciptakan dalam keadaan yang beranekaragam, oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi manusia selain merespon keanekaragaman tersebut secara arif dan bijak. Mengabaikan dan menyetepikan keaneragaman sama halnya dengan melawan kodrat yang telah digariskan Tuhan.

Gagasan Agama Sipil juga muncul dari pemikiran Andrew Sahnks dengan terminologi Teologi Sipil yang menegaskan bahwa munculnya konsepsi tersebut tidaklah dimaksudkan untuk menjadi ancaman bagi eksistensi agama dan teologi konvensional, juga tidak untuk menghalangi kesetiaan orang pada teologi bawaannya tetapi dia merembes kedalam teologi-teologi konvensional itu dengan sedikit memberi kritik terhadap mekanisme solidaritas yang dibangun sebagai upaya melahirkan kesetiaan sosial bagi keterbukaan sejati dalam lingkup budaya politik disekitarnya.¹⁰ Senada dengan Shanks, John A. Coleman juga menegaskan bahwa konsep Agama Sipil merupakan bentuk identitas nasional dan solidaritas agama yang muncul untuk kepentingan integrasi sosial masyarakat.¹¹ Sahnks dalam hal ini ingin menegaskan bahwa agama atau yang disebutnya sebagai teologi konvensional mengandung narasi yang mengukuhkan identitas komunitas dalam lingkup satu agama, sementara teologi sipil merupakan satu bentuk meditasi atas identitas lain, yakni sebagai warga Negara. Sementara Coleman menegaskan bahwa agama sipil adalah kebutuhan untuk integrasi sosial masyarakat dalam bernegara.

⁶ Peter L. Berger and Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 2013), h. 108

⁷ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 36

⁸ Muhamad Murtadlo, 'Agama Sipil: Sebuah Jalan Tengah?(Antara Negara Sekuler Dengan Negara Agama)', *Jurnal Dialog*, 28 (2020).

⁹ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama; Tinjauan Kritis* (Jakarta: Pespektif, 2005), h. 153

¹⁰ Andrew Shanks, *Agama Sipil* (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), h. 13

¹¹ John A. Coleman, 'Civil Religion', *Sociological Analysis*, 31.2 (1970), h. 67-77

Salah satu praktik yang sesungguhnya bisa dilakukan umat manusia adalah membangun konsensus yang bisa diterima semua pihak dengan menggunakan idiom agama sebagai landasan bersama dalam merespon keanekaragaman. Tentu saja penggunaan idiom agama untuk dijadikan konsensus tersebut adalah yang bersifat netral dan independen serta bebas dari unsur-unsur diskriminasi.

Karenanya tidak berlebihan jika dikatakan, seandainya umat beragama menginginkan agar supaya tidak terjadi - meminjam istilah Samuel P. Huntington - “benturan antar peradaban”, maka harus secara sukarela mengkonstruksi tatanan kehidupan yang lebih apik dengan melakukan apa yang disebut oleh Jean Jacques Rousseau sebagai “kontrak sosial”. Dengan melakukan kontrak sosial, maka umat beragama akan survive dan rela berkorban membatasi kebebasan individunya, karena dibalik kebebasan ternyata diseberang sana terdapat pula kebebasan orang lain yang merupakan hak azasi manusia. Hal ini berarti bahwa kebebasan seorang individu akan dibatasi oleh kebebasan seorang individu lain¹², namun tetap melakukan interaksi.

Menurut Rousseau, dalam melakukan kontrak sosial, seseorang akan kehilangan sebagian kebebasannya. Namun Rousseau menjamin bahwa, karena ia memberikannya kepada keseluruhan masyarakat yang anonim dan abstrak, maka sebenarnya ia tidak menyerahkan kebebasan itu kepada siapapun kecuali kepada dirinya sendiri. Atau dengan melakukan kontrak sosial seseorang akan kehilangan kebebasan alamiahnya yaitu kebebasan yang ditopang oleh kekuatan individual, namun ia memperoleh kebebasan sipil yaitu kebebasan yang dijamin oleh *general will* (kehendak umum).¹³

Dalam kaitan ini, sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Rousseau bahwa masalah mendasar yang dapat diselesaikan oleh kontrak sosial adalah “mencari suatu bentuk asosiasi yang mempertahankan dan melindungi pribadi dan milik setiap anggota asosiasi dengan segala kekuatan bersama, dan di dalam asosiasi itu masing-masing yang menyatu dalam kelompok hanya patuh pada dirinya sendiri dan tetap bebas seperti sediakala”. Sedangkan “pasal-pasal” dalam kontrak dapat disingkat menjadi satu yaitu alienasi total dari setiap anggota asosiasi berikut semua haknya kepada seluruh masyarakat.¹⁴

Inti dari teori Kontrak Sosial Rousseau adalah bahwa masing-masing individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan. Dengan demikian maka segala hak alamiah, termasuk kebebasan penuh untuk berbuat sekehendak hati yang dimiliki oleh orang-orang dalam kehidupan alamiah itu pindah ke komunitas, atau dalam bahasa politik, pada komunitas sebagai satu keutuhanlah terletak kedaulatan rakyat, dan kedaulatan ini tidak dapat pula dibagi-bagi.¹⁵ Atau dengan kata lain, kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut bahwa kebebasan masing-masing orang dibatasi demi hak dan kebebasan setiap orang lain yang sama besarnya, dan juga oleh tuntutan kehidupan bersama.¹⁶

Selain teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Rousseau, sebenarnya dapat pula mengkaitkan tema *civil religion* dengan teori titik temu agama-agama yang diintroduksi oleh Frithjof Schuon. Schuon menggambarkan sebuah piramida yang dibatasi oleh sebuah garis horizontal. Bagian atas adalah aspek esoterisme, sedangkan bagian bawah adalah aspek eksoterisme. Secara sederhana gambar tersebut dapat dipahami bahwa pada tataran esoterisme semua agama bertemu dan bersatu atau semua

¹² Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 146

¹³ Jean-Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, Terj. Rahayu Surtiati Hidayat Dan Ida Sundari Husen (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).

¹⁴ Rousseau.

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (UII Press, 1990), h. 69

¹⁶ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 1991, h. 258

agama memiliki sesuatu yang disebut dengan *the ultimate reality*. Sedangkan pada tataran eksoterisme, agama berbeda atau berpisah, dimana masing-masing memiliki cara dan metode dalam hal tata peribadatan atau praktek pengamalan ibadahnya.¹⁷

Pemikiran Robert N. Bellah tentang *civil religion* merupakan salah satu contoh tentang bagaimana ia melakukan pembacaan sosiologis atas fenomena aktual agama. Artinya, ia berhasil membuktikan bahwa perspektif sosiologi agama punya suara, bukan lagi perspektif pinggiran sebagaimana anggapan banyak orang. Bellah mencontohkan praktik *civil religion* ini dengan mengutip penyebutan “Tuhan” oleh Presiden Amerika John F. Kennedy, dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden pada 20 Januari 1961. Konsep Tuhan di situ sama sekali tidak mengacu kepada agama apa pun, karena kalimat itu bisa diterima oleh semua orang. Menurut Bellah, “Jika kita dapat memahami mengapa dia menyebut Tuhan....., maka kita akan banyak memahami *civil religion* di Amerika.”¹⁸

Dalam konteks ini terkait dengan kondisi Indonesia dimana terjadi tarik menarik antara ideologi keagamaan dengan ideologi kebangsaan, harus segera disudahi dengan sama-sama memahami konsep *civil religion* yang berciri khas Indonesia dengan berbasis kepada konsensus-konsensus nasional yang disepakati bersama oleh tokoh pendiri bangsa sebelum atau setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hanya dengan demikian, Indonesia akan tumbuh menjadi negara bangsa yang besar, bangsa yang kaya akan latar belakang kultural dan agama, tetapi mampu hidup bersama dalam ikatan kebangsaan yang memposisikan setiap warga negara secara merata, baik dalam hak maupun kewajiban sebagai warga negara.

Kebangsaan Indonesia Sebagai Identitas Kolektif

Sebagai sebuah negara bangsa dengan realitas keragaman yang plural, kelahiran Indonesia tentu memiliki akar historis, filosofis ataupun sosiologis yang menjadi latar berdirinya negara Indonesia. Memahami berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara bangsa memerlukan sebuah analisis sosio-historik untuk menjelaskan keunikan atau bahkan kerumitan dinamika sosiologis yang terjadi dalam pembentukan negara Indonesia. Keunikan dan atau kerumitan itu dapat dipahami karena di dalam negara Indonesia itu terdapat identitas ganda, *pertama*, identitas primordial yang mencakup keragaman budaya dan agama, dan *kedua*, identitas nasional, sebuah identitas baru yang menuntut kesadaran setiap warga negara untuk memberinya makna, mengapa identitas nasional itu harus ada.¹⁹ Disinilah letak keunikan tetapi sekaligus mengandung kerumitan tersendiri.

Ketika para pendiri bangsa mendirikan negara-bangsa tahun 1945, merasa yakin bahwa meskipun etnik (baca: suku) berbeda-beda tetapi berasal dari asal-usul leluhur yang sama, memiliki pengalaman kolektif sejarah yang sama (di bawah penjajahan Belanda dan kemudian Jepang); karena merasa mempunyai masa lalu yang sama dan akan menghadapi masa depan yang sama.

Indonesia sebagai sebuah bangsa sesungguhnya tidak memiliki masalah dengan identitas primordial karena identitas pertama itu telah melekat erat pada setiap orang.²⁰ Setiap orang telah mengerti menjadi bagian dari identitas primordialnya, seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan yang lainnya. Masalahnya adalah bagaimana identitas nasionalisme itu memiliki makna agar mendapat tempat dan diterima bersama dengan

¹⁷ Frithjof Schuon, *Mencari Titik Temu Agama-Agama* (Pustaka Firdaus, 1987), h. xi

¹⁸ Robert N. Bellah, *Beyond Belief; Esei-Esei Tentang Agama Di Dunia Modern*, ed. by Rudy Harisya Alam (Paramadina, 2000), h. 239-240

¹⁹ John A. Titaley, *Religiusitas Di Alinea Tiga; Pluralisme, Nasionalisme, Dan Transformasi Agama-Agama* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013), h. 157

²⁰ Titaley.

identitas promordial tersebut. Untuk memahami makna identitas nasionalisme itu hanya mungkin dapat dimengerti dari dinamika sosio-historis yang kompleks.

Soekarno adalah salah satu tokoh sentral yang tampil memukau memberi makna tentang identitas nasionalisme itu dengan gagasannya tentang Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme.²¹ Menurut Titaley, Nasionalisme Soekarno itu memiliki akar pada budaya Jawa yang di yakini sebagai budaya yang kuat dan kaya serta dapat merepresentasikan identitas nasional. Hal ini mungkin dapat dipahami dari realitas bahwa Jawa merupakan mayoritas secara demografis. Adapun Islamise berkonotasi sebagai sebuah gerakan ideologis yang ditopang oleh sebagian gerakan-gerakan Islam dan mendapat dukungan dari beberapa orang kelompok Budi Utomo. Sedangkan Marxisme yang merupakan wajah dari Sosialisme yang didukung oleh kelompok berpendidikan Barat dengan mengusung gagasan-gagasan tentang egalitarianisme, demokrasi, dan keadilan.²²

Dalam konteks ini kita dapat menemukan akar sejarah lahirnya perdebatan yang melahirkan pemikiran dalam mencari identitas nasional terutama memasuki tahapan pembahasan bentuk dan dasar negara, antara kelompok nasionalisme yang berakar pada aristokrasi dan kaum sekular berpendidikan barat dengan kelompok Islam, atau antara nasionalisme sekular versus nasionalisme Islam. Dinamika itulah adalah suatu era yang menjadi tonggak krusial tetapi penuh vitalitas yang mempengaruhi alam pikiran dan perkembangan pembentukan identitas nasional.²³

Jika ingin melacak sejarah, ternyata dari serangkaian kilasan sejarah yang tersedia, setiap gerakan yang muncul dalam panggung sejarah bangsa Indonesia merupakan kontinuitas yang saling mengisi. Boedi Oetomo yang dikobarkan oleh dokter Soetomo dan kawan-kawan satu abad yang lalu, seringkali dijadikan tonggak sejarah atas hari Kebangkitan Nasional. Gerakan moral yang semula hanya berskala regional (etnis Jawa) itu menemukan afinitasnya sebagai kesadaran awal paham kebangsaan. Gerakan itu mengilhami Sumpah Pemuda, yang mempertegas kebutuhan: *satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa*, yang tanpa menyertakan satu-agama sebagai bentuk pencegahan pelembagaan pembulatan mayoritas, yang dapat memadamkan pluralitas. Jangkauan imajinasi yang dituangkan dalam Sumpah Pemuda, bukan sekedar memuat kebutuhan historis, tentang *Bhineka Tunggal Ika*, tetapi juga menyediakan pencegahan kemungkinan terjadinya negara agama.²⁴

Pada 1 Juni, Bung Karno merumuskan Pancasila sebagai ideologi negara, yang kemudian diperingati sebagai lahirnya Pancasila, sebagai upaya mempertegas kembali bahwa pluralitas adalah suatu realitas bagi Bangsa Indonesia. Sebaliknya tragedi tahun 1965 yang dalam versi rezim Orde Baru disebut G-30-S/PKI, seringkali dianggap sebagai hari penghianatan Pancasila. Hari itu kemudian ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Makna terdalam dari seluruh gerakan ini adalah kuatnya semangat persatuan dalam perbedaan, berbeda-beda tetapi tetap satu. *Bhineka Tunggal Ika*.²⁵

Sejarah perkembangan dalam perumusan Pancasila dan perubahan-perubahan dari Pancasila Soekarno 1 Juni, menjadi Piagam Jakarta 22 Juni sampai Pancasila yang ditetapkan 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi kemerdekaan itu telah melahirkan sebuah rasa keberagamaan (religiusitas) dan membawa dampak besar yang

²¹ Soekarno, *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme, Pikiran-Pikiran Soekarno Muda*, 1st edn (Sega Arsy, 2015).

²² Titaley, h. 158-159

²³ M. Asrul Pattimahu, *Oase Peradaban Islam: Islam Dalam Isu Global* (Yogyakarta: LP2M IAIN Ambon bekerja sama dengan Penerbit Deepublish, 2017), h. 26

²⁴ Anas Saidi, 'Relasi Pancasila, Agama Dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi', *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 11.1 (2009), 25–50.

²⁵ Saidi.

positif bangsa bangsa Indonesia.²⁶ Persitiwa 18 Agustus itu telah menegaskan bahwa Pancasila bukanlah disusun hanya sekedar untuk mengakomodasi kepentingan satu agama (Islam) saja, tetapi dibuat untuk menjadi landasan bernegara negara Indonesia yang warga negaranya adalah plural secara agama. Kehilangan tujuh kata sakral dalam konsep piagam Jakarta tidak serta merta menjadikan Indonesia sebagai negara sekular, atau seperti yang sering dikatakan Pancasila menjadi musuh agama.²⁷

Agama membutuhkan Pancasila dalam menyelesaikan keterbatasannya, khususnya dalam mempertemukan kehendak bersama antar agama dan atau mereduksi ikatan primordial yang potensial menghadirkan konflik. Dalam dimensi sosiologis agama seringkali memiliki fungsi laten sebagai "pemecah" (*out group*) dan sekaligus fungsi sebagai "perekat" (*in group*). Kondisi ini hanya mungkin dapat dijembatani melalui konsensus bersama, yang antara lain melalui Pancasila. Sebaliknya Pancasila membutuhkan agama dalam memperkaya kedalaman makna hidup, khususnya yang berkaitan nilai-nilai abstraksi (seperti; eksistensi Tuhan, penjelasan tentang kematian, dan sebagainya).

Pancasila Sebagai Proyek Identitas Nasional

McCrone dan Bechhofer, identitas nasional tidak sekedar berkonotasi suatu tempat dimana seseorang berada, tetapi lebih jauh bermakna bagaimana seseorang masuk melibatkan diri secara total dalam kehidupan sosial-budaya, sejarah, dan kultural masyarakat. Menurut Kymlicka, Identitas nasional memiliki kapasitas untuk menyatukan orang dan memperkuat ikatan antara seseorang dan negara dengan kemampuan mempersatukan manusia dan menopang nilai gotong royong. Identitas nasional ini, bagaimanapun, berbeda dari kelompok sosial yang ada dalam beberapa hal. Identitas nasional dikembangkan sebagai hasil dari ikatan etnis yang merupakan komponen penting dari masyarakat; bahkan Kymlicka menggambarkannya sebagai kesatuan multinasional dan polietnis dalam kehidupan yang memunculkan cita-cita bersama yang lebih bersifat politis dan formal.²⁸ Dalam konteks ini, identitas nasional dipahami sebagai kesatuan nilai yang terus dihidupkan dalam konstruksi sosial masyarakat sebagai budaya kolektif diruang publik serta menjadi milik bersama karena terus dihidupkan secara bersama.

Identitas nasional berbeda dengan konsep Politik identitas, yang secara tegas didefinisikan oleh Cressida Heyes sebagai penanda keterlibatan politik dalam arti yang lebih luas, serta teorisasi dari temuan pengalaman ketidakadilan yang dihadapi oleh anggota kelompok sosial tertentu.²⁹ Politik identitas berkaitan dengan pembebasan dari situasi tertindas yang secara khusus mencakup konstituensi organisasi dalam konteks yang lebih luas, daripada mengatur diri sendiri dalam kerangka ideologi atau afiliasi partai. Adanya keutuhan esensial tentang keberadaan kelompok-kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordial tampaknya ditegaskan oleh politik identitas.³⁰ Kebangkitan politik identitas dalam dinamika politik Indonesia tidak terlepas dari rasa ketidakadilan dan persamaan hak masing-masing kelompok atau kelas

²⁶ Titaley, h. 159

²⁷ Yudi Latif dalam M. Asrul Pattimahu, 'AGAMA DAN MASA DEPAN KEBANGSAAN INDONESIA', *Dialektika*, 13.1 (2020).

²⁸ Muhammad Mona Adha, Dayu Rika Perdana, and Supriyono, 'Nilai Pluralistik: Eksistensi Jatidiri Bangsa Indonesia Dilandasi Aktualisasi Penguatan Identitas Nasional', *Jurnal Civic Hukum*, 6.1 (2021), 10–20.

²⁹ Cressida Heyes, *Identity Politics*, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2007, diakses dari [Plato.Stanford.edu/entries/identity-politics](https://plato.stanford.edu/entries/identity-politics)

³⁰ Suryani and Ana Sabhana Azmy, 'POLITIK IDENTITAS DAN NASIONALISME KEBANGSAAN (Studi Atas Penguatan Politik Identitas Etnis Tionghoa Di Indonesia Pasca Orde Baru)', *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (Jakarta, 2016).

sosial. Lebih jauh, karena disparitas merupakan tolak ukur fundamental dari keragaman Indonesia, politik identitas di Indonesia semakin menekankan perbedaan tersebut. Mengabaikan perselisihan yang dipicu oleh berbagai politik identitas akan mengakibatkan ketidakstabilan negara.³¹

Indonesia adalah Negara yang setiap warga negaranya memiliki lebih dari satu identitas. Setiap warga Negara Indonesia di dalam dirinya terdapat identitas yang disatu sisi menjadi faktor integrasi, tetapi juga terdapat identitas yang dapat menjadi faktor disintegrasi. Jauh sebelum terbentuknya Negara bangsa Indonesia, setiap orang telah melekat dalam dirinya identitas kultural dan keyakinan keagamaan. Identitas kultural dan keyakinan agama dalam hal ini dipahami sebagai identitas etnis, dimana keduanya bisa menjadi faktor disintegrasi atau perpecahan dalam masyarakat. Disisi lain, nasionalisme yang merupakan identitas politik adalah bentuk identitas yang mengikat ikatan-ikatan kultural dan agama dalam konsep Negara bangsa. Dalam hal ini, nasionalisme Indonesia menjadi faktor integrasi karena etnisitas yang berbeda-beda itu menyatu dalam ikatan kebangsaan karena adanya keinginan yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kebangkitan identitas tidak hanya merupakan praktik perjuangan berbasiskan identitas kelompok atas dasar etnik, agama, atau denominasi sosial-kultural lainnya.³² Kebangkitan identitas juga dimaknai dalam bentuk kesadaran dan mobilisasi atas dasar identitas kolektif yang sebelumnya disembunyikan (*hidden*), ditekan (*suppressed*), atau diabaikan (*neglected*) oleh kelompok dominan yang terdapat dalam sistem demokrasi liberal atau oleh agenda politik kewarganegaraan yang diusung untuk dan atas nama demokrasi yang lebih progresif.³³ Di Indonesia, masalah etnis, agama, ideologi, dan kepentingan lokal – lebih erat dikaitkan dengan politik identitas, yang seringkali diwakili oleh elit dengan artikulasi yang berbeda. Politik identitas dapat dianggap sebagai manifestasi dari gerakan pemekaran daerah. Keadilan dan pembangunan daerah telah menjadi isu yang sangat penting dalam wacana politik keaderah, tetapi apakah itu gerakan murni atau dipengaruhi oleh ambisi elit lokal untuk menjadi pemimpin adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab.³⁴

Politik identitas dalam hal ini lebih merupakan ekspresi dari ketidakpuasan kelompok-kelompok sosial tertentu yang merasa belum tersentuh oleh kebijakan sehingga melahirkan berbagai ketimpangan sosial. Kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, akses pendidikan dan pembangunan yang tidak merata adalah isu-isu yang lahir bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran identitas.

Manuel Castells menggambarkan bahwa identitas dapat dikonstruksi dalam tiga pola, yakni: identitas legitimasi (*legitimizing identity*), identitas resisten (*resistance identity*) dan identitas proyek (*project identity*). Identitas yang dikenakan oleh sebuah institusi yang mendominasi dan memiliki legitimasi dalam suatu masyarakat untuk merasionalisasikan dan memperpanjang dominasinya atas aktor-aktor sosial, seperti negara yang mendominasi kelompok etnis tertentu, dikenal sebagai *identitas legitimasi*. *Identitas resisten* dimaknai sebagai identitas yang dikembangkan oleh aktor-aktor sosial yang berada di bawah tekanan atau penindasan akibat dominasi dan *stereotip* pihak lain, menimbulkan resistensi sebagai reaksi untuk mempertahankan kelangsungan hidup

³¹ Yeni Sri Lestari, 'Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama', *Journal of Politics and Policy*, 1.1 (2018), 19–30.

³² Daniel Sparringa, 'Multikulturalisme Sebagai Respon Alternatif Terhadap Politik Identitas Dan Resolusi Konflik Yang Bersifat Transformatif: Sebuah Perspektif Sosiologi Politik', *Paper That Was Conveyed in a Course and Short Training about Human Rights and Democracy That Was Held by CESASS-UGM in Coordination with NCHR-Oslo University* (Norway, Jogjakarta, 2005).

³³ Stuart Hall and Paul Du Gay, *Questions of Cultural Identity*, SAGE Publications (Sage, 1996).

³⁴ Ahmad Syafii Maarif, et.al, *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*, Pusat Studi Agama Dan Demokrasi (PUSAD) (Yayasan Wakaf Paramadina, 2010).

kelompoknya. Sedangkan *identitas proyek* merupakan identitas baru yang diciptakan oleh aktor sosial yang memiliki kemampuan untuk mendefinisikan kembali identitas baru.³⁵

Dalam konteks inilah Pancasila harus dimaknai sebagai suatu proyek dalam pembentukan identitas nasional yang merupakan identitas ketiga setelah identitas agama dan identitas kultural. Pancasila dalam hal ini merupakan nilai baru yang mempersatukan sekaligus melengkapi kekayaan makna hidup dalam konteks kehidupan sosial sebagai sebuah bangsa. Sebagai nilai baru, Pancasila tentu menjadi proyek dalam arti akan terus tumbuh membentuk pola kehidupan sosial keagamaan dan kultural. Dalam memberikan makna dalam kehidupan sosial, Pancasila tidak bersifat statis, tidak berhenti dimaknai pada satu era tertentu saja, tetapi kedalaman makna kehidupan berbangsa terus tumbuh karena membutuhkan inovasi menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang juga terus tumbuh.

KESIMPULAN

Indonesia adalah satu model negara sekaligus bangsa yang pembentukannya melalui suatu tahap perjuangan yang cukup panjang, baik fisik, politik, terlebih pertarungan gagasan yang terjadi secara dialektik sampai melahirkan konsensus untuk membangun negara bangsa yang demokratis dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bagian dari konsensus inti dari pembentukan negara bangsa Indonesia, dan sesuai konsep-konsep yang dibangun misalnya oleh Robert N. Bellah tentang Agama Sipil. Pancasila adalah Agama Sipil bagi bangsa Indonesia, karena menguatkan identitas primordial dengan melahirkan identitas nasional. Dalam makna itu, identitas primordial, baik identitas agama maupun identitas etnis tidak harus menjadi ancaman terhadap identitas nasional, tetapi harus menjadi alat untuk menguatkannya, karena identitas primordial sesungguhnya yang melahirkan kesadaran untuk saling menguatkan dalam ikatan kebangsaan yang kokoh. Pancasila dalam konteks ini tidak harus dipahami hanya sebagai suatu doktrin kebangsaan, tetapi sebagai suatu identitas baru ditengah identitas agama dan identitas kultural. Karena itu, Pancasila harus terus diberi makna, ditafsir agar terus hidup dalam pertumbuhan kesadaran kolektif bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila akan terus menjadi proyek tanpa henti untuk pembangunan kebangsaan, Pancasila juga menjadi identitas kolektif bangsa Indonesia.

³⁵ Manuel Castells Paulus Sugeng Widjaja, Djoko Prasetyo Adi Wibowo, and Imanuel Geovasky, 'Politik Identitas Dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila Di Ruang Publik', *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian*, 6.1 (2021), 95.

REFERENSI

- Adha, Muhammad Mona, Dayu Rika Perdana, and Supriyono, 'Nilai Pluralistik: Eksistensi Jatidiri Bangsa Indonesia Dilandasi Aktualisasi Penguatan Identitas Nasional', *Jurnal Civic Hukum*, 6 (2021), 10–20
- Bellah, Robert N., *Beyond Belief ; Esei-Esei Tentang Agama Di Dunia Modern*, ed. by Rudy Harisyah Alam (Paramadina, 2000)
- Berger, Peter L., and Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 2013)
- Coleman, John A., 'Civil Religion', *Sociological Analysis*, 31 (1970), 67
- Elson, Robert Edward, *The Idea of Indonesia* (Penerbit Serambi, 2009)
- Hall, Stuart, and Paul Du Gay, *Questions of Cultural Identity*, SAGE Publications (Sage, 1996)
- Hidayat, Komaruddin, *Agama Untuk Peradaban: Membumikan Etos Agama Dalam Kehidupan* (Pustaka Alvabet, 2019)
- Lestari, Yeni Sri, 'Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama', *Journal of Politics and Policy*, 1 (2018), 19–30
- Maarif, Ahmad Syafii, *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*, Pusat Studi Agama Dan Demokrasi (PUSAD) (Yayasan Wakaf Paramadina, 2010)
- Madjid, Nurcholish, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999)
- , *Indonesia Kita* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- Murtadlo, Muhamad, 'Agama Sipil: Sebuah Jalan Tengah?(Antara Negara Sekuler Dengan Negara Agama)', *Jurnal Dialog*, 28 (2020)
- Pattimahu, M. Asrul, 'AGAMA DAN MASA DEPAN KEBANGSAAN INDONESIA', *Dialektika*, 13 (2020)
- , *Oase Peradaban Islam: Islam Dalam Isu Global* (Yogyakarta: LP2M IAIN Ambon bekerja sama dengan Penerbit Deepublish, 2017)
- Rousseau, Jean-Jacques, *Kontrak Sosial*, Terj. Rahayu Surtiati Hidayat Dan Ida Sundari Husen (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)
- Sagaff, Said, Muhammad Mario Said, and Widiawati Said Saggaf, *Reformasi Pelayanan Publik Di Negara Berkembang*, 1st edn (SAH MEDIA, 2018)
- Saidi, Anas, 'Relasi Pancasila, Agama Dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi', *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 11 (2009), 25–50
- Schuon, Frithjof, *Mencari Titik Temu Agama-Agama* (Pustaka Firdaus, 1987)
- Shanks, Andrew, *Agama Sipil* (Yogyakarta: Jalasutra, 2003)
- Sjadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (UII Press, 1990)
- Soekarno, *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme, Pikiran-Pikiran Soekarno Muda*, 1st edn (Sega Arsy, 2015)
- Sparringa, Daniel, 'Multikulturalisme Sebagai Respon Alternatif Terhadap Politik Identitas Dan Resolusi Konflik Yang Bersifat Transformatif: Sebuah Perspektif Sosiologi Politik', *Paper That Was Conveyed in a Course and Short Training about Human Rights and Democracy That Was Held by CESASS-UGM in Coordination with NCHR-Oslo University (Norway)*, Jogjakarta, 2005)
- Suryani, and Ana Sabhana Azmy, 'POLITIK IDENTITAS DAN NASIONALISME KEBANGSAAN (Studi Atas Penguatan Politik Identitas Etnis Tionghoa Di Indonesia Pasca Orde Baru)', *Repository.Uinjkt.Ac.Id*
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 1991
- Thoha, Anis Malik, *Tren Pluralisme Agama; Tinjauan Kritis* (Jakarta: Pespektif, 2005)
- Titaley, John A., *Religiusitas Di Alinea Tiga; Pluralisme, Nasionalisme, Dan Transformasi Agama-Agama* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013)

Widjaja, Paulus Sugeng, Djoko Prasetyo Adi Wibowo, and Imanuel Geovasky, 'Politik Identitas Dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila Di Ruang Publik', *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahan*, 6 (2021), 95